



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA - P)

**DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**Dinas Sosial Kota Jambi
Jln. Jend. Sudirman No. 156 Telp. 0741-24193 Fax. 0741 - 31682
JAMBI - 36128**



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS SOSIAL

Jln. Jenderal Sudirman Nomor 156, Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi
36138 Telepon (0741) 24193, Faksimile (0741) 31682
Laman: dinsos.jambikota.go.id, Pos-el: dinsos@jambikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

NOMOR 37.a TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2025 perlu disusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Sosial Kota Jambi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Kegiatan tahun anggaran 2025
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Jambi
9. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025.
- KETIGA : Pejabat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal 25 Juni 2025.

KEPALA DINAS,

YUNITA INDRAWATI, AP, MP, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740607 199403 2 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas berkat Rahmad – Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi 2024 – 2026.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada Tahun 2025.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan Laporan ini kedepan.

Jambi, Juni 2025

KEPALA DINAS SOSIAL



YUNITA INDRAWATI, AP, MP, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 Latar Belakang 1

 Landasan Hukum..... 1

 Maksud dan Tujuan 2

 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN LALU (2023) 4

 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Jambi 4

 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi..... 13

 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi..... 14

 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 21

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Jambi 22

 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 22

 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Jambi..... 23

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Jambi..... 25

BAB V Penutup 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat , martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat, seiring dengan derasny arus globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia, Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan social terus meningkat dan professional seiring dengan dengan Hak-haknya selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negative dari persoalan sosial semakin meningkat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ke depan akan semakin kompleks dan multi demensional, karena masalah social berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial) dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya masalah kesejahteraan sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat rencana berupa RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 Dinas Sosial Kota Jambi sebagai acuan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan landasan hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- 3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 7) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- 8) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Propinsi, dan Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
- 10) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
- 11) Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2025 adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Untuk Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial dan ini dituangkan kedalam 5 (lima) bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud & Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Jambi
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Jambi
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

TAHUN LALU (2023)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Perangkat Daerah Dinas Sosial terdiri dari satu sekretariat dan empat bidang. Hasil Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi dan
Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023 Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Dengan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun Januari 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									

1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	B	6.421.922.349	6.151.162.973	95,78			
1.06.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			58.035.250	57.049.870	98,30	57.584.350		
1.06.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			4.418.701.855	4.233.477.071	95,81	5.027.691.385		
1.06.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			33.010.000	32.560.000	98,64	0		

1.06.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian			158.100.000	154.511.907	97,73	144.700.000		
1.06.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum			326.507.298	324.843.938	99	464.222.096		
1.06.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah			298.190.652	278.984.000	93,56	165.337.921		
1.06.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			520.843.600	489.214.257	93,93	564.547.600		
1.06.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang			608.533.694	580.521.930	95,40	441.030.000		

		Milik Daerah								
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PPKS	100%		1.771.106.770	1.744.738.226	98,51	1.735.733.200		
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan			28.955.910	27.036.910	93,37	26.951.800		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah PSKS yang			1.742.150.860	1.717.701.316	98,60	1.708.781.400		

	Sosial Daerah Kabupaten/Kota	diberdayaka n								
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%		53.063.080	31.708.98 0	59,76	46.540.000		
1.06.03 .2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kota Jambi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	Jumlah OT yang di pulangkan			53.063.080	31.708.98 0	59,76	46.540.000		
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh	100%		1.472.214. 645	1.385.478. 215	94,11	1.229.308.34 0		

		bantuan sosial dan dilayani								
1.06.04 .2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani			729.707.844	693.044.105	94,98	657.350.000		
1.06.04 .2.02	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan			742.506.801	692.434.110	93,26	571.958.340		

	Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	an Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani								
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani	100%		1.970.315.781	1.754.218.811	89,03	2.108.740.900		
1.06.05 .2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	jumlah anak terlantar			27,034,405	26,265,510	97,16	25.027.500		
1.06.05 .2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Pengelolaan			1.943.281.376	1.727.953.301	88,92	2.083.713,400		

	Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin								
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat	100%		700.486.56 2	609.320.7 40	86,99	693.309.200		
1.06.06 . 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani			351.822.08 0	279.753.9 40	79,52	315.394.200		
1.06.06 . 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Penyeleng- garan Pemberdaya- an Masyarakat terhadap			348.664.48 2	329.566.8 00	94,52	377.915.000		

		Kesiapsiaga an Bencana								
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain :

1. Belum maksimalnya SDM pendukung dalam hal penanganan PPKS;
2. Anggaran belum maksimal.

Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kerjasama dengan stacholder terkait;
2. Mengoptimalkan kemampuan SDM pendukung dalam hal penanganan PPKS.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai target/standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Persentase PPKS di Luar Panti yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %	85 %	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pendatang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan sosial dan Tenaga Kerja yang semakin semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan bagian tidak bisa terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi.

Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber-sumber ekonomi.

Kedepan kita akan mengupayakan pengembangan program jaminan sosial dan bursa kerja oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial seperti perhatian terhadap pekerja sekaligus penyuluh sosial baik dari unsur masyarakat maupun pegawai negeri yang saat ini belum maksimal.

Isu-isu Strategis yang berkembang tentang Masalah Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya kapasitas aparatur daerah, keuangan dan asset daerah serta implementasi reformasi birokrasi belum optimal.
- 2) Rendahnya tingkat kedisiplinan ketaatan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan, norma agama serta nilai-nilai sosial budaya.
- 3) Meningkatnya jumlah PPKS seiring dengan penambahan penduduk
- 4) Rendahnya akses dan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial
- 5) Belum terpenuhinya fasilitas Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, lansia terlantar, korban Napza, Orang dengan HIV / AIDS dan lain-lain

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Sosial Kota Jambi perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijaksanaan Program operasional dan kegiatan-kegiatan.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Sosial tidak terlepas dari kondisi yang mendukung kegiatan dan faktor-faktor lain dari kegiatan dimaksud. Kondisi

yang akan diuraikan ini dilakukan melalui beberapa analisis yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal.

A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

➤ Kekuatan (*Strength*)

- a. Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik.
- b. Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah, Kelembagaan Organisasi, Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha dalam mengatasi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
- c. Jumlah aparatur SKPD yang jumlahnya relatif cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Peningkatan peran / partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan.
- e. Tersedianya Anggaran Dana yang bersumber dari APBD Kota Jambi untuk mendukung Program Kegiatan dan Tugas– tugas operasional.
- f. Terbentuknya struktur kelembagaan Dinas Sosial Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi

➤ Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Belum memadainya produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Jambi.
- b. Masih banyaknya penduduk yang berada pada kelompok miskin.
- c. Ketersediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum akurat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- d. Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal Aparatur Pemda yang berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
- e. Belum optimalnya dukungan dan peran serta aktif *stakeholders* daerah (dunia usaha-masyarakat) dalam pengelolaan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan social .
- f. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif dan kurang percaya diri.

B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

➤ Peluang (*Opportunity*)

- a. Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan secara kelompok dalam bentuk KUBE dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- b. Keterlibatan dan peran serta aktif Orsos ditengah – tengah masyarakat & Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti yayasan – yayasan, LSM Orsos dan Karang Taruna sesuai fungsi sosialnya
- c. Pengelolaan Sumber Daya Personil dalam mendukung dan membantu tugas-tugas pelayanan Kesejahteraan sosial (Pegawai, Tagana, PSM,)
- d. Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program corporate social responsibility (CSR) merupakan implementas dan tanggungjawab & Kepedulian perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan social.

➤ Ancaman (*Threats*)

- a. Tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), Fakir Miskin, Anak terlantar, Anak Jalanan, Korban Narkoba, Korba HIV/AIDS, Keluarga Rentan, Lansia Terlantar & WTS;
- b. Kurangnya Pemanfaatan Potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan social dan tenaga kerja,;
- c. Rendahnya Tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif , mandiri dan kurang percaya diri.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPD

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RPD Tahun 2026 Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	8.410.266.446	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	8.410.266.446	
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi	- Persentase Pemberdayaan	100 %	2.178.000.000	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi	- Persentase Pemberd	100 %	2.178.000.000	

			Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PPKS					ayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PPKS			
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		- Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 %	72.600.000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		- Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	100 %	72.600.000	

								Kekerasan			
4.	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan dilayani	100 %	2.934.250.000	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan dilayani	80 %	2.934.250.000	
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani dan	100 %	1.815.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani	80 %	1.815.000.000	

			Persentase Fakir Miskin yang Didata dan dilayani					dan Persenta se Fakir Miskin yang Didata dan dilayani			
6.	Program Penanganan Bencana		Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	100 %	1.240.250.000	Program Penanganan Bencana		Persentase Penangana n Bencana saat tanggap darurat	80 %	1.240.250. 000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan daerah di Kota Jambi membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme E-planing musrenbang. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level terbawah sampai tingkat Kota. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2022, tidak terdapat usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Dinas Sosial Kota Jambi dengan Program Indikator Kecamatan. Namun ada beberapa usulan dari hasil musrenbang kecamatan yaitu Non Pagu Indikator Kecamatan yang merupakan kegiatan rutin program kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Jambi yaitu pengusulan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Pelatihan Bagi Disabilitas, Bantuan Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Tongkat Kruk, Etalase Jualan Sarapan, Kemeja Lapangan Karang Taruna, Sound Senam Lansia, Seragam Karang Taruna, Seragam Lansia, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Pengolahan Makanan Tradisional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2025 adalah: MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG DENGAN MENEKANKAN TERBANGUNNYA STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DI BERBAGAI WILAYAH YANG DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

TABEL
TUJUAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

No	Tujuan Dinas Sosial	Indikator Tujuan Dinas Sosial	Target Kinerja Tujuan Dinas Sosial Tahun 2025
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial.	Tingkat Pelayanan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Keluarga Miskin	Persentase Penduduk Miskin	100 %

	dan Orang Tidak Mampu.		
3	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase PPKS yang Tertangani	100 %

TABEL
SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

No	Sasaran Dinas Sosial	Indikator Sasaran Dinas Sosial	Target Kinerja Sasaran Dinas Sosial
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %
2	Peningkatan Pelayanan Kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	100 %
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar Diluar Panti	Persentase PPKS Terlantar Diluar Panti yang Tertangani	100%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan sasaran yang harus dilaksanakan serta permasalahan-permasalahan yang diprediksi dalam bidang perencanaan maka rencana dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Skala Prioritas RPD Kota Jambi pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 dapat dijabarkan pada program kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - (2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - (3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - (2) Pengadaan Mebel
 - (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 1) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- 2) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN

- 1) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 - (1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - (1) Penyediaan Permakanan
 - (2) Penyediaan Sandang
 - (3) Penyediaan Alat Bantu
 - (4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - (1) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - (2) Penyediaan Permakanan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- 1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - (1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - (2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - (3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - (1) Penyediaan Makanan
 - (2) Penyediaan Sandang
 - (3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - (4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - (5) Pelayanan Dukungan Psikososial
- 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - (1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - (2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 terdiri dari Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari 6 Program, 17 Kegiatan 44 Sub Kegiatan dengan Total Rencana Anggaran sebesar Rp.15.244.152.528,-

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi
1.06.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Jambi	A	7.753.152.528	APBD		8.410.266.446	Kota Jambi
1.06.01. 2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	Kota Jambi	A	111.009.050	APBD		122.109.820	Kota Jambi
1.06.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	100 %	5.011.577.450	APBD		5.512.735.195	Kota Jambi
1.06.01. 2.03	Administrasi Barang	Tertib Administrasi	Kota	100 %	44.539.000	APBD		48.992.900	Kota Jambi

	Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jambi						
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	Kota Jambi	100 %	144.000.00	APBD		152.250.000	Kota Jambi
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	Kota Jambi	100%	409.158.028	APBD		445.073.831	Kota Jambi
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	100%	575.000.000	APBD		575.000.000	Kota Jambi
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	100%	502.662.000	APBD		503.377.000	Kota Jambi
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	100%	955.207.000	APBD		1.050.727.700	Kota Jambi

	Daerah								
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PPKS	Kota Jambi	100%	1.980.000.000	APBD		2.178.000.000	Kota Jambi
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan	Kota Jambi	75 Izin	60.500.000	APBD		66.550.000	Kota Jambi
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan	Kota Jambi	170 orang	1.919.500.000	APBD		2.111.450.000	Kota Jambi
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Jambi	100%	66.000.000	APBD		72.600.000	Kota Jambi

1.06.03 .2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Jambi	225 Orang	66.000.000	APBD		72.600.000	Kota Jambi
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial yang di layani	Kota Jambi	100 %	2.667.500.000	APBD		2.934.250.000	Kota Jambi
1.06.04 .2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang dilayani	Kota Jambi	1250 Orang	1.127.500.000	APBD		1.240.250.000	Kota Jambi

1.06.04 .2.02	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZAdi Luar Panti Sosial yang di layani	Kota Jambi	750 Orang	1.540.000.000	APBD		1.694.000.000	Kota Jambi
1.06.0 5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS Terlayani	Kota Jambi	100 %	1.650.000.000	APBD		1.815.000.000	Kota Jambi
1.06.05 .2.01	Pemeliharaan Anak- Anak terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Kota Jambi	35 orang	55.000.000	APBD		60.500.000	Kota Jambi
1.06.05 .2.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin	Kota Jambi	72000 KK	1.595.000.000	APBD		1.754.500.000	Kota Jambi

1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	Kota Jambi	100 %	1.127.500.000	APBD		1.240.250.000	Kota Jambi
1.06.06 .2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	Kota Jambi	325 Kejadian	660.000.000	APBD		726.000.000	Kota Jambi
1.06.06 .2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Kota Jambi	125 Orang	467.500.000	APBD		514.250.000	Kota Jambi
TOTAL					15.244.152.528			16.650.366.446	

BAB V

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Jambi diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh aparat dalam Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi. Rencana Kerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Jambi ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2025 yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional, hal ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Jambi. Untuk ini diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana ini, semoga dapat bermanfaat dan dalam menjalankan tugas kedepannya mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi.



Jambi, Juni 2025

KEPALA DINAS

YUNITA INDRAWATI, AP, MP, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP.19740607 199403 2 002